



**TINDAK PIDANA PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**M. SYAHRIR SIDIQ  
NPM. 5117500009**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERBANKAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

**Disusun Oleh :**

**M. SYAHRIR SIDIQ  
NPM. 5117500009**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. SANUSI, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0609086202**

**Pembimbing II**

  
**H. TOSHIARYADI, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0020045801**

# **PENGESAHAN**

## **JUDUL SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

Oleh :

**M. SYAHRIR SIDIQ  
NPM 5117500009**

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 26 Februari 2021

Penguji I



IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0625058106

Penguji II



TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H.  
NIDN. 0619058703

Pembimbing I



Dr. H. SANUSI, S.H., M.H.  
NIDN. 0609086202

Pembimbing II



H. TOMIARYADI, S.H., M.H.  
NIDN. 0020045801

Menggetahui  
Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Iqbal Hamzani, S.H., M.Ag.  
NIDN. 0615067604

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Syahrir Sidiq**  
NPM : 5117500009  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 21 November 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 20 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



**M. Syahrir Sidiq**

## ABSTRAK

**Sidiq, M. Syahrir.** *Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021.

Perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan, dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Seiring dengan semakin bervariasinya kegiatan dan usaha perbankan juga dapat menjadi salah satu faktor semakin terbuka lebarnya peluang untuk melakukan tindak pidana. Banyak kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan di Indonesia dan modus yang dilakukan semua berbeda-beda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan menganalisis akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan tindak pidana perbankan pada perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs. Jenis penelitian adalah kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen dengan tekniknya. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Ketentuan hukum tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan sanksi pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2); 2) Akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan tindak pidana perbankan pada Perkara No. 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs berkaitan dengan usaha bank yang termasuk dalam kategori kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perbankan, dan Undang-Undang.

## ABSTRACT

**Sidiq, M. Syahrir.** *Banking Crime Based on Law Nomor 10 of 1998 concerning Amendments to Law Nomor 7 of 1992 concerning Banking.* Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2021.

Banking is an institution of trust, in carrying out its business, it is very dependent on public trust to be able to grow and develop. In line with the increasingly varied activities of banking activities and businesses, it can also become a factor in the widening of opportunities to commit criminal acts. There are many cases of banking criminal acts committed in Indonesia and the modes that are carried out are different

This study aims to find out the provisions of the banking crime law based on Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and to analyze the legal consequences for banks who commit banking crimes in case Number 94/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs. This type of research is a library research, the approach used is normative legal research. The main data source is secondary data obtained from literature and documents using the technique. The data analysis used in this research is qualitative data analysis using content analysis techniques and by means of deductive thinking.

The results of this study concluded that 1) The provisions of banking criminal law based on Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking are distinguished into two forms, namely crime and violation. Banking crime in the category of crime consists of seven articles, namely Articles 46, 47, 47A, 48 paragraph (1), 49, 50, and Article 50A. Banking crime with a category of offense with a lighter criminal sanction than a crime classified as a crime, consists of one article, namely Article 48 paragraph (2); 2) The legal consequences for the parties involved in the banking crime in Case No. 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs relating to bank businesses that fall into the category of crime as regulated in the provisions of Article 49 Paragraph (1) letter a of Law No. 10 of 1998 concerning amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, namely imprisonment for 9 (nine) years and a fine of Rp.10,000. 000.000, - (ten billion rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment for 7 (seven) months.

Based on the results of this study, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal.

**Keywords:** Crime, Banking, and Law.

## **PERSEMBAHAN**

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat maupun dorongan baik berupa moril dan materiil dalam penyusunan skripsi.
- Semua keluargaku, yang telah mengisi hari-hariku dengan bahagia sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater tercinta UPS Tegal.

## **MOTTO**

1. Bila Anda berhutang 100 Dollar, andalah yang pusing. Tapi bila Anda berhutang 100 juta Dollar, bank yang akan pusing. (Jean Paul Getty)
2. Bank adalah tempat yang bisa meminjamkan uang kepadamu jika kau bisa buktikan bahwa kau tidak membutuhkannya. (Bob Hope)
3. Uang dapat menjadikan keretakan keluarga atau persahabatan. Jangan meminjam uang pada kerabat atau sahabat. Jangan pernah. (M. Syahrir Sidiq)
4. Waspadalah terhadap biaya kecil. Sebuah kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal yang besar. (Benjamin Franklin)
5. Jangan pernah biarkan ekonomi saja menentukan karir Anda atau bagaimana Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda. (Denis Waitley)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak H. Tony Haryadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, 20 Februari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
 BAB I    PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	19
 BAB II    TINDAK PIDANA PERBANKAN .....	 21
A. Tinjauan Umum tentang Perbankan .....	21
1. Pengertian Bank .....	21
2. Fungsi Bank .....	23
3. Jenis-Jenis Bank .....	25
4. Kegiatan-Kegiatan Bank .....	30
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	33
1. Pengertian Tindak Pidana .....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	37
3. Sanksi Pidana .....	40

C. Tindak Pidana Perbankan .....	45
D. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	53
B. Akibat Hukum terhadap Para Pihak Bank yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan pada Perkara No. 94/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs .....	71
BAB IV PENUTUP .....	81
A. Simpulan .....	81
B. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dimana kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>1</sup> Perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan semakin kompleks. Maka, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 23.

Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena Undang-Undang Perbankan yang lama memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka undang-undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.<sup>2</sup>

Memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa sehingga perkembangan ekonomi nasional dewasa ini semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional. Hal ini dapat dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan perekonomian nasional. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak

---

<sup>2</sup> Gazali, Djoni S. & Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 44.

pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang langgar, yaitu yang diatur umum dalam undang-undang perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>3</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*, dalam kamus hukum, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>4</sup> Menurut Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang (pidana). Sedangkan Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Banyak kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan di Indonesia dan modus yang dilakukan semua berbeda-beda. Mirisnya pelaku yang melakukan tidak jauh dari kalangan orang internal Bank itu sendiri. Terbanyak kasus tindak pidana perbankan banyak terjadi pada Bank BUMN. Lemahnya pengawasan dan budaya korupsi berjamaah di Bank plat merah ini, makin menambah catatan kredit fiktif dan pembobolan dana milik rakyat yang

---

<sup>3</sup> Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 179.

<sup>4</sup> Sudarsono, . *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

<sup>5</sup> Pawennei, Mulyati & Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 6.

dipercayakan Bank BUMN tersebut. Kasus ini mempertebal kepercayaan masyarakat akan rendahnya etika profesionalisme pengelola perbankan dan lemahnya sistem pengawasan bank terutama pengawasan internal.<sup>6</sup>

Etika profesionalisme sangat penting bagi pengelolaan bank karena pada dasarnya kekayaan yang dikelola oleh pengurus bank sebagian besar merupakan kekayaan masyarakat yang dipercayakan padanya. Perbankan memang telah mengalami suatu ujian yang sangat berat terutama dalam profesionalisme kepengurusan bank. Sebenarnya hal tersebut tidak hanya terjadi pada industri perbankan Indonesia tetapi juga pada industri perbankan di luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kerugian yang diderita oleh bank multinasional yang disebabkan oleh pengurus bank.

Disamping penipuan yang dilakukan oleh orang dalam perbankan, bentuk transaksi bank telah pula menyebabkan perbankan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan asal usul dana yang berasal dari tindak pidana. Upaya pengaburan ini dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*) yang beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi sorotan internasional. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya tindak kejahatan *money laundering* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Salah satu contoh kasus tindak pidana perbankan yaitu perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Romdhoni, Helmi, *Bentuk tindak Pidana Perbankan, Kebanyakan Pelakunya Orang Dalam*, Online <https://www.inanews.co.id/2020/05/bentuk-tindak-pidana-perbankan-kebanyakan-pelakunya-orang-dalam/> dipublikasikan 2 Mei 2020, diakses tanggal 06 Januari 2021.

Pada kasus tersebut terdakwa Yuli Respitowanti als Yuli binti Suwandi selaku Audit Intern BPR Jatibarang Sediaguna bersama Sukeriyati binti Sunono als Keri dan Rimbawan Setiowati als Ana binti Sukisman (masing-masing berkas terpisah) pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, di PT BPR Jatibarang Sediaguna yang beralamat di Jln. Raya Timur Karanglo No. 9 Karanglo Jatibarang Brebes Jawa Tengah, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa dalam posisi sebagai SPI (*Audit Intern*) di BPR Jatibarang Sediaguna pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 melakukan perbuatan membuat kredit yang tidak disertai dokumen/fiktif sebanyak 2.565 (dua ribu lima ratus enam puluh lima) rekening kredit dengan plafon sebesar Rp. 19.620.000.000,- (Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Baki Debet 13.732.353.500,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pada akhir tahun 2016 terdakwa berinisiatif menciptakan kredit dengan menggunakan identitas/data debitur lama yang sudah lunas kemudian terdakwa input pada aplikasi (*Excell*) dengan mengubah nama atau alamatnya sehingga menjadi fiktif atau palsu, dari aplikasi tersebut dihasilkan dokumen berupa: Kartu angsuran debitur (kartu merah), Bukti pembayaran angsuran (kartu putih), Tanda terima pinjaman sementara, Surat pernyataan Penerimaan



dana kredit, Jurnal pencairan Kredit, dan Slip Pengambilan Tabungan. Besarnya plafon terdakwa menyesuaikan jumlah dana pelunasan kredit yang jatuh tempo yang terdakwa gunakan sebelumnya dan tergantung kebutuhan pribadi. Keseluruhan dokumen tersebut di atas terdakwa serahkan kepada saksi Rimbawan Setiowati (berkas terpisah) selaku bagian tabungan tanpa adanya tanda tangan dari Direksi BPR Jatibarang Sediaguna untuk diproses dan saksi Rimbawan Setiowati menuruti memproses kredit fiktif tersebut.

Perbuatan terdakwa, saksi Sukeriyati dan saksi Rimbawan Setiowati menciptakan kredit fiktif di BPR Jatibarang Sediaguna secara terus menerus berakhir ketika Tim dari OJK Tegal pada tanggal 12 Agustus 2019 melakukan pemeriksaan di BPR Jatibarang Sediaguna, dari hasil pemeriksaan OJK ditemui 9.516 rekening kredit fiktif dengan total plafon Rp. 68.640.500.000,- (enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut digunakan oleh terdakwa, saksi Sukeriyati dan saksi Rimbawan Setiowati untuk keperluan pribadi dan membayar angsuran/pelunasan kredit fiktif sebelumnya.

Tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*).<sup>7</sup> Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>7</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 149.

(KUHP) sebagai peraturan yang mengatur secara tegas mengenai seluruh tindak pidana pada umumnya, juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini dapat terjadi karena semakin hari semakin banyak pelaku dan motif dalam tindak pidana di bidang perbankan, dimana pelaku tersebut melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan, dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Seiring dengan semakin bervariasinya kegiatan dan usaha perbankan juga dapat menjadi salah satu faktor semakin terbuka lebarnya peluang untuk melakukan tindak pidana. Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, untuk memudahkan penulisan, terhadap permasalahan tersebut penulis merumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan tindak pidana perbankan pada perkara Nomor 94/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan tindak pidana perbankan pada perkara Nomor 94/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini, secara teoritis maupun dari segi praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan kontribusi positif khususnya pada hukum pidana dalam perbankan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum, khususnya para akademisi dalam mengkritisi penerapan tindak pidana perbankan.
2. Secara praktis, memberikan masukan terhadap perkembangan hukum khususnya di bidang perbankan terutama bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang menyangkut tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam pihak bank, dan sebagai pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan sifat kehati-hatian dalam memberikan data pribadi kepada bank dengan memilih lembaga perbankan yang terpercaya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Terkait masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana perbankan, hasil penelusuran peneliti belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Alifin Nurahmana Wanda (2020), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana perbankan terkait dengan kerahasiaan bank. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 serta Pasal 47A Undang-Undang Perbankan. Pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada kedua tindak pidana sebelumnya yakni pengurus berbuat pengurus yang bertanggungjawab, serta bank berbuat melakukan tindak pidana maka pengurus yang bertanggungjawab.<sup>8</sup>
2. Budiyono (2011), *Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*. Tujuan penelitian untuk untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun

---

<sup>8</sup> Wanda, Alifin Nurahmana, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank*, *Indonesian Journal of Criminal Law (IjoCL)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020:1-44.

1998 tentang Perbankan dan peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana Per-bankan. Dari kedua permasalahan itu, kemudi-an akan dicarikan solusi melalui upaya-upayayang bisa dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perbankan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, diatur dalam Pasal 46 - Pasal 50A. Ketentuan jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan dikelompokkan dalam 5 kelompok besar, yaitu tindak pidana berkaitan dengan perizinan; tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha; tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank; tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia; dan tindak pidana berkaitan dengan pihak tera-filiasi. Peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan meliputi upaya preventif dan represif.<sup>9</sup>

3. Iketut Windia (2014), *Tindak Pidana dalam Perbankan (Suatu Kajian Teoritis)*. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan menggunakan metode analisis isi. Isi kajian dilakukan dengan menyimak berbagai terori yang diakumulasikan kemudian diinduksi serta disajikan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwasannya Bank Indonesia adalah bank sentral dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Sedangkan wewenangnya adalah menyusun rencana kredit,

---

<sup>9</sup> Budiyono, Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 Edisi Khusus, Februari 2011:113-122.

memberikan kredit likuiditas, memberikan kredit kuantitas dan kualitas, menyusun rencana devisa, menetapkan tingkat bunga/politik diskonto, menjalankan politik pasar terbuka, membina dan mengawasi bank dan kebijakan perubahan cadangan minimum. Jenis tindak pidana di bidang perbankan dapat dikategorisasikan menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan bank.<sup>10</sup>

4. Ramiyanto (2016), *Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Berbankan*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Indonesia, tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 49 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur ancaman pidana untuk tindak pidana perbankan dengan sistem minimum khusus. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan pidana penjara bersyarat. Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (*judex facti*) Nomor 437/Pid.Sus/2013 yang menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 telah menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum, yaitu selama enam bulan penjara dengan sistem bersyarat. Menurut Pasal 14

---

<sup>10</sup> Windia, Iketut, Tindak Pidana dalam Perbankan (Suatu Kajian Teoritis), *Widyasrama*, Vol. 23, No. 1, Agustus 2014:147-159

ayat (1) KUHP, pidana bersyarat hanya dapat dilakukan apabila majelis hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Analisis putusan ini berfokus pada pokok pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 terkait penjatuhan pidana penjara bersyarat, dilihat dari ketentuan lamanya ancaman pidana. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam kasus tersebut dapat dibenarkan dengan alasan demi keadilan serta fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang melingkupinya.<sup>11</sup>

5. Hana Faridah (2018), Jenis-Jenis Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 1, Desember 2018:106-125. Fokus penelitian ini yaitu kajian tentang jenis-jenis tindak pidana perbankan dan perbandingan antara Undang-Undang Perbankan yang lama dengan yang baru. Hasil penelitian menyimpulkan tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Adapun jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan sebagai berikut: tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46), tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A),

---

<sup>11</sup> Ramiyanto, Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Berbankan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 3, 2016: DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i3.14>.



tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank (Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)), dan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank (Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A. Undang-Undang Perbankan yang baru terdapat banyak perubahan terutama menyangkut ketentuan pidana dan sanksi administratif terhadap suatu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan. Perubahan-perubahan dalam Bab VII Tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terdapat dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 undang-undang tersebut.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Janis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian ini menggunakan data utamanya adalah data sekunder. Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hana Faridah, Jenis-Jenis Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 1, Desember 2018:106-125.

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Jadi penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang mengkaji buku-buku atau literatur, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan. Kajian pustaka ini difokuskan pada tindak pidana perbankan pada perkara Nomor 94/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs yang bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan menganalisis kibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan bank pada perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai judul penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>14</sup> Penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, dimana penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau

---

<sup>14</sup> Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33.

peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

Suatu penelitian selalu diperlukan data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban permasalahan penelitian yang diajukan.<sup>16</sup> Jenis dan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.<sup>18</sup> Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>17</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

<sup>18</sup> Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian, media massa, dan makalah-makalah.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>20</sup> Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>21</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.<sup>22</sup>

Terkait dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 224.

<sup>22</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>23</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dokumen dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>24</sup> Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>25</sup>

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.<sup>26</sup> Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Op Cit.*, hlm. 291.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>25</sup> Ashafa, Burhan, *Op Cit.*, hlm. 16.

<sup>26</sup> Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 147.

<sup>27</sup> Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 36.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Dari bahan yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Suatu penelitian sudah tentu memerlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tindak Pidana Perbankan. Bab ini membahas tinjauan umum perbankan, tinjauan umum tindak pidana, tindak pidana, perbankan dan gambaran umum tentang Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan penelitian, antara lain ketentuan hukum tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan tindak pidana perbankan pada perkara No. 94/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait tindak pidana perbankan.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PERBANKAN

#### A. Tinjauan tentang Perbankan

##### 1. Pengertian Bank

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Pada awalnya, bank adalah kumpulan pedagang-pedagang yang akan memberikan pinjaman biji-bijian kepada para petani atau pedagang yang membawa barang.<sup>28</sup>

Menurut Dendawijaya bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan, yang menyelurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.<sup>29</sup> Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu

---

<sup>28</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>. Online: tanggal 05 Januari 2020, pukul 10.29 Wib.

<sup>29</sup> Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 14.



berkaitan dalam bidang keuangan. Dimana kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diartikan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya, serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

---

<sup>30</sup> Kasmir, *Op Cit.*, hlm. 23.

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 29.

## 2. Fungsi Bank

Secara umum bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dalam bentuk pinjaman. Namun, lebih spesifik dijelaskan Susilo, dkk bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan (*financial intermediary*). Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.<sup>32</sup>

- a. *Agent of Trust*. Dasar utama kegiatan perbankan kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dan pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya.
- b. *Agent of Development*. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.
- c. *Agent of Service*. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat, yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Susilo, Sri Y; Triandaru, Sigit; & Santoso, Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 9.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Fungsi bank juga dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Kasmir bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi yang penting, sebagai penunjang perekonomian suatu Negara. Adapun fungsi bank pada umumnya adalah sebagai badan perantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito; sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal; dan sebagai *intermediary finance*, yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.<sup>34</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>34</sup> Kasmir, *Op Cit.*, hlm. 156.

### 3. Jenis-Jenis Bank

Praktek perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan terdapat beberapa perbedaan. Adapun jenis perbankan dewasa ini jika dipantau dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, menurut fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Bank Desa
- 6) Lumbung Desa
- 7) Bank Pegawai
- 8) Dan bank lainnya.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya hanya dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa,

Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

- 1) Bank milik pemerintah, bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan.

- 2) Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.
  - 3) Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
  - 4) Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikan jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).
  - 5) Bank milik campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.
- c. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Adapun jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

- 1) Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- 2) Bank non-devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat), mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:
  - a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
  - b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu yang dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam), bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penetapan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba, dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c) Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).



Dari uraian penjelasan di atas, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

#### **4. Kegiatan-Kegiatan Bank**

Kegiatan bank dalam prakteknya dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank, yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda. Kegiatan bank umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat, artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Berikut dijelaskan kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya.

a. Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank konvensional memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam prakteknya ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank umum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa.

Masing-masing status memberikan pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non-devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut.

- 1) Menghimpun Dana (*Funding*), kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*.
- 2) Menyalurkan Dana (*Lending*), merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *Lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank

dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

- 3) Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Services*), jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung negatif *spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang andal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya.

b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seeluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga

dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Praktek kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR, meliputi menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>35</sup> Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan.

Tindak pidana sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara

---

<sup>35</sup> Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum, yang sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>36</sup>

Mencermati, maka istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Berikut penjelasan dari beberapa ahli hukum terkait dengan rumusan tindak pidana.

- a. Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>37</sup>
- b. Indiyanto Seno Adji, menjelaskan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>38</sup>
- c. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*

---

<sup>36</sup> Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 69.

<sup>37</sup> Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 97.

<sup>38</sup> Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm. 155.

positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>39</sup>

- d. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup>
- e. Vos merupakan salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>41</sup>
- f. Simons merumuskan tindak pidana sebagai sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.
- g. Prodjodikoro menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>42</sup>
- h. Jonkers menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Effendi, Erdianto, *Op Cit.*, hlm. 98.

<sup>40</sup> Chazawi, Adami, *Op Cit.*, hlm. 75.

<sup>41</sup> Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 97.

<sup>42</sup> Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelel, Pidana, Tindak pidana, Teori-teori, Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 75.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 71.

Mencermati rumusan tindak pidana di atas, maka perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, antara lain:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>44</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang istilah yang dipergunakan para ahli hukum sebagai terjemahan *strafbaarfeit*, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar

---

<sup>44</sup> Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Op Cit.*, hlm. 60.

<sup>45</sup> Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentas)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 21.

larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Jadi, tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Prasetyo, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)



- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>46</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>47</sup> Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, dan bersifat melawan hukum. Selanjutnya Jonkers menyebutkan unsur-unsur tindak pidana antara lain perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggung jawabkan.<sup>48</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, hlm. 50.

<sup>47</sup> Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 12.

<sup>48</sup> Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm. 81.

<sup>49</sup> Leden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar. Grafika, 2009, hlm. 9.

- a. Unsur Subjektif, menurut Leden, unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.<sup>50</sup>
- b. Unsur Objektif, menurut Leden, unsur objektif merupakan unsure dari luar diri pelaku yang terdiri empat unsur, yaitu: *pertama*, perbuatan manusia (berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omission* (yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan), *kedua*, akibat perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya, *ketiga*, keadaan-keadaan. Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan, dan *keempat*, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 9.

membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>51</sup>

### 3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>52</sup> Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>53</sup>

Mencermati pengertian sanksi pidana, Ali menyimpulkan bahwa bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>52</sup> Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 185.

<sup>53</sup> Andrisman, Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm. 8.

(hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok, terdiri dari:

- 1) Pidana Mati, hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.<sup>55</sup>
- 2) Pidana Penjara, merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi

---

<sup>54</sup> Ali, Mahrus, *Op Cit.*, hlm. 195.

<sup>55</sup> Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Op Cit.*, hlm. 294.

anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>56</sup>

- 3) Pidana Kurungan (*Hechtenis*), adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.<sup>57</sup> Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:
  - a) Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belas tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat (3) dari Pasal 12)\
  - b) Menurut Pasal 19 ayat (2) KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
  - c) Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
  - d) Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>56</sup> Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23.

<sup>57</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 95.

- 4) Pidana Denda, adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana dendamerupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.<sup>58</sup> Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan.
- 5) Pidana Tutupan, dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah 1948 No. 8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hamzah, Andi, *Op Cit.*, hlm. 189.

<sup>59</sup> Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Op Cit.*, hlm. 302.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.<sup>60</sup>

- a. Pencabutan hak-hak tertentu. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal, antara lain tidak bersifat otomatis dan jangka waktu pencabutan hak oleh hakim.<sup>61</sup>
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 125.

<sup>61</sup> Hamzah, Andi, *Op Cit.*, hlm. 211-212.

<sup>62</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Cet Ke-14*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 18.

- c. Pengumuman putusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.<sup>63</sup> Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### C. Tindak Pidana Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Munir Fuady, hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain. Sedangkan Djumhana merumuskan hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 45.

<sup>64</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Yogyakarta: Prenada Media, 2010, hlm. 39.



Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan. Hukum perbankan pada prinsipnya merupakan keseluruhan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya

Penyebutan “tindak pidana perbankan” bukannya “tindak pidana di bidang perbankan” dalam penelitian ini bukanlah tanpa sebab, karena tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan adalah dua hal yang berbeda. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak merumuskan secara khusus mengenai defenisi tindak pidana perbankan. Undang-undang tersebut hanya mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang perbankan sebagai tindak pidana pelanggaran atau kejahatan.

Menurut Moch. Anwar, Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan tindak pidana perbankan (*banking crime*) dapat

memiliki arti tindak pidana yang dilakukan oleh bank.<sup>65</sup> Lingkup tindak pidana di bidang perbankan lebih luas daripada tindak pidana perbankan, karena mencakup kejahatan-kejahatan yang merupakan tindak pidana konvensional seperti misalnya pencurian, penggelapan, penipuan terhadap bank yang dilakukan oleh nasabah, pegawai bank atau orang lain. Sedangkan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana para pelanggar dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.

Mencermati uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maupun dalam perundang-undangan lainnya seperti KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya intern.

Mencermati uraian dari tiap-tiap istilah di atas, maka penulis memutuskan untuk menggunakan istilah tindak pidana perbankan dalam

---

<sup>65</sup> Setiadi, Edi & Yulia, Rena, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 139.

tulisan ini. Hal ini penulis lakukan dengan pertimbangan bahwa fokus pada penelitian ini yaitu perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan perbankan yang sifatnya intern.

#### **D. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimaksudkan untuk mempersiapkan perbankan memasuki era globalisasi. Undang-undang ini juga disusun untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan tentang perbankan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi di bidang perdagangan barang dan jasa maupun perekonomian yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor Perbankan.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan Presiden BJ. Habibie pada tanggal 10 Nopember 1998 di Jakarta dan diundangkan di tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Akbar Tanjung. Undang-undang ini diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182. Penjelasan tersebut ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

1. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan semakin kompleks serta sistem keuangan semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
3. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang.<sup>66</sup>

Dasar hukum Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

---

<sup>66</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-10-1998-perubahan-uu-7-1992-perbankan>.  
diterbitkan 04 November 2019, diakses tanggal 06 Januari 2021.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).<sup>67</sup>

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan atau pembukaan kantor cabang.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi. Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap Perbankan, ketentuan mengenai Rahasia Bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang

mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Untuk menunjang kinerja Perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC), dan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang Perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, maka semakin banyak juga kesempatan timbulnya kemungkinan seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan. Semakin luas kesempatan tersebut, akan berbanding lurus dengan banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang langgar, baik yang diatur umum undang-undang perbankan maupun yang diatur khusus perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat diancam hukuman pidana berdasarkan undang-undang. Unsur tindak pidana adalah subyek dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, maka tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Tampubolon, Nelson, *Pahami & Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Otoritas Jasa Keuangan, Online: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/>. Diakses 6 Januari 2021.



Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan

korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, dalam pembahasan ini, penulis hanya akan membahas tindak pidana perbankan, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana para pelanggar dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu. Tindak pidana perbankan dapat dikatakan tindak pidana yang sifatnya intern.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 51, yang berbunyi:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan penggolongan tindak pidana perbankan di atas, maka tindak pidana perbankan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal

46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.

Ruang lingkup tindak pidana perbankan menurut ketentuan hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai berikut:

1. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana ini berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang atau sekelompok orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang mendirikan bank, tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan. Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi:

- (3) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

- (4) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Penerapan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah orang-perorangan atau Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perserikatan, CV, Firma, atau badan lainnya dikenakan sanksi pidana apabila tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau melakukan kegiatan seperti Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan tindak pidana perbankan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah pemberi perintah dan/atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat.

## 2. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang

keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank.

Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 47 Undang-Undang Perbankan:

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

#### Pasal 47 Undang-Undang Perbankan:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).”

Penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang tidak membawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila dengan sengaja memaksa pihak bank atau Pihak Terafiliasi bank seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris termasuk kuasa dan keluarganya, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya, untuk memberikan keterangan tentang nasabah bank bersangkutan dan simpanannya, misalnya nama nasabah dan jumlah simpanan, dalam kaitannya dengan keperluan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Piutang dan Lelang Negara dan kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan.

Penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris atau direksi, pegawai bank termasuk kuasa dan keluarganya, para pemegang saham, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah dan simpanan bank yang bersangkutan, misalnya nama dan jumlah simpanan.

Penerapan ketentuan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi

pidana yang bersifat kumulatif, apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan tentang simpanan nasabah seperti yang telah dimintakan oleh pihak terkait dalam rangka kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atau atas permintaan dari nasabah yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak yang dikenakan ancaman pidana terkait dengan ketentuan rahasia bank adalah:

- a. Pihak yang dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.
- b. Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja membuka keterangan yang wajib dirahasiakan.
- c. Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak pidana rahasia bank yang dikecualikan tersebut, tidak dipidana. Pengecualian atas ketentuan rahasia bank meliputi:

- a. untuk kepentingan perpajakan, atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
- b. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
- c. untuk kepentingan peradilan perkara pidana, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);

- d. dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya;
- e. dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya;
- f. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis; dan
- g. atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.<sup>69</sup>

Pelaksanaan pembukaan rahasia bank sebagaimana butir 1) s.d 3) wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Sementara butir 4) s.d 7) tidak memerlukan izin untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK).

### 3. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui

---

<sup>69</sup> Tampubolon, *Op Cit.*, hlm. 26-27.



bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan.

Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, maka telah melakukan tindak pidana perbankan kelompok ini, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan apabila bank lalai menyampaikan atau melaksanakan kewajiban tersebut, bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Pasal 48 Undang-Undang Perbankan:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Penerapan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh OJK dalam rangka melakukan tugas pengawasan berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Sedangkan penerapan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi

pidana yang bersifat kumulatif atau alternatif, apabila yang bersangkutan lupa atau melakukan kesalahan atau dengan kelalaiannya tidak memberikan keterangan yang diminta oleh OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

4. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan usaha bank

Semakin banyak dan bervariasi kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank. Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi

pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau *pendiskontoan* oleh bank atas surat-surat wesel, surat *promes*, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank,
  - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir a bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam rangka mendukung dugaan tipibank ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup baik tertulis maupun tidak tertulis, antara lain berupa dokumen asli sebagai pembandingan dari dokumen/pembukuan/laporan.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja menyebabkan suatu transaksi/ data/angka/

informasi tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam rangka mendukung dugaan tipibank ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa dokumen bank yang tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak memberikan informasi sebenarnya pada pencatatan dalam pembukuan, dokumen, laporan, atau rekening bank, ataupun dengan sengaja mengubah, mengaburkan, meniadakan, atau menyembunyikan fisik catatan, sehingga catatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam rangka mendukung dugaan tipibank ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa dokumen bank yang tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank

dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja melakukan segala upaya untuk mendapatkan atau mengizinkan untuk mendapatkan suatu barang, uang, atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan perbuatan untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas atau produk dari bank, misalnya pegawai bagian kredit menerima imbalan dari pihak penerima kredit karena telah mempercepat pelaksanaan proses kreditnya meskipun dokumen administratif yang bersangkutan belum lengkap. Perbuatan ini dapat diketahui dari dokumen-dokumen tertulis mengenai permintaan atau tanda terima barang, rekaman percakapan atau keterangan saksi-saksi terkait.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak patuh kepada Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan CDO yang telah ditetapkan oleh OJK.

Tipibank terkait dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan bersifat umum, dengan kata lain dapat terjadi dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya. Dalam penyaluran dana, khususnya pemberian kredit, perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Tanpa perjanjian kredit

yang ditandatangani bank dan debitur, maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

5. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan pihak terafiliasi

Tindak pidana perbankan berkaitan dengan pihak terafiliasi ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penerapan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan, Pihak Terafiliasi dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak patuh pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya pihak konsultan hukum yang memberikan advis hukum kepada bank umum untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan jasa, sehingga transaksi penyertaan modal tersebut melanggar Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana dan ancaman hukuman bagi Pihak Terafiliasi dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan sama dengan tindak pidana dan ancaman hukuman bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Perbankan. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Terafiliasi atau lebih sering disebut tindak pidana “orang dalam” perlu mendapat perhatian khusus. Tindak pidana orang dalam bank adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Tindak pidana “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank, karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam dapat digolongkan dalam dua cara. *Pertama*, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. *Kedua*, *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim dikecualikan dari prinsip *business judgement*. Tindak pidana “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (*regulator*). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.

#### 6. Tindak pidana perbankan berkaitan dengan pemegang saham

Tindak pidana perbankan berkaitan dengan pemilik/pemegang saham ini diatur dalam Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, berbunyi:



Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penerapan ketentuan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, Pemegang Saham dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan ataupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dapat dibuktikan dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bank yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip *piercing corporate veil*. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Berdasarkan pembahasan ketentuan hukum tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs pada penelitian ini termasuk dalam tindak pidana perbankan berkaitan dengan usaha bank yang termasuk dalam kategori kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terdakwa Yuli Respintowati Binti Suwandi Alias Yuli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nuntur serta melakukan, membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

**B. Akibat Hukum terhadap Para Pihak Bank yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan pada Perkara No. 94/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs**

Tindak pidana perbankan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan tindak pidana administratif. Tindak pidana administratif merupakan tindak pidana yang timbul melalui Undang-Undang yang bersifat administratif. Berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus, tindak pidana administratif timbul dari prefensi terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam suatu undang-undang yang sifatnya administratif.

Larangan pada undang-undang ini pada umumnya diancam dengan sanksi administratif, tetapi pada beberapa Undang-Undang juga terdapat pasal-pasal dengan ancaman sanksi pidana. Sebagai sebuah undang-undang

administratif, Undang-Undang Perbankan bukanlah opsi satu-satunya dalam praktik peradilan pidana. Terdapat beberapa Undang-Undang lain yang sering digunakan untuk mendakwa tersangka kasus perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh tindak pidana perbankan itu sendiri yang memiliki banyak sisi yang dapat ditelaah secara parsial. Hal ini sesuai dengan modus tindak pidana perbankan yang cukup rumit dan terdiri dari tahapan-tahapan yang pada akhirnya dapat dipandang sebagai gabungan tindak pidana (*concursum*).

Proses peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk membuat surat dakwaan yang sesuai dengan hasil penyidikan sehingga dapat menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam pemeriksaan melalui persidangan. Menurut Yahya Harahap,<sup>70</sup> dua hal yang penting untuk diperhatikan mengenai surat dakwaan adalah perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan surat dakwaan harus menjadi landasan pemeriksaan sidang pengadilan. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan tersangka. Walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki keleluasaan dalam perumusan surat dakwaan, tetapi keleluasaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Penetapan aturan hukum yang akan digunakan dalam surat dakwaan haruslah dilakukan dengan cermat agar sangsi pidana sesuai dengan perbuatannya. Adapun gambaran kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs, sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 387.

#### 1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Yuli Respitowanti Binti Suwandi Alias Yuli;  
 Tempat lahir : Tegal;  
 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Juli 1972;  
 Jenis kelamin : Perempuan;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Griya Palem Asri Blok C5 Nomor 8 RT.003 / 005  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : SPI / Audit Intern BPR Jatibarang Sediaguna.

#### 2. Kasus Posisi

Pada kasus tersebut terdakwa Yuli Respitowanti als Yuli binti Suwandi selaku Audit Intern BPR Jatibarang Sediaguna bersama Sukeriyati binti Sunono als Keri dan Rimbawan Setiowati als Ana binti Sukisman (masing-masing berkas terpisah) pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, di PT BPR Jatibarang Sediaguna yang beralamat di Jln. Raya Timur Karanglo No. 9 Karanglo Jatibarang Brebes Jawa Tengah, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa dalam posisi sebagai SPI (*Audit Intern*) di BPR Jatibarang Sediaguna pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 melakukan perbuatan

membuat kredit yang tidak disertai dokumen/fiktif sebanyak 2.565 (dua ribu lima ratus enam puluh lima) rekening kredit dengan plafon sebesar Rp. 19.620.000.000,- (Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Baki Debet 13.732.353.500,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pada akhir tahun 2016 terdakwa berinisiatif menciptakan kredit dengan menggunakan identitas/data debitur lama yang sudah lunas kemudian terdakwa input pada aplikasi (*Excell*) dengan mengubah nama atau alamatnya sehingga menjadi fiktif atau palsu, dari aplikasi tersebut dihasilkan dokumen berupa: Kartu angsuran debitur (kartu merah), Bukti pembayaran angsuran (kartu putih), Tanda terima pinjaman sementara, Surat pernyataan Penerimaan dana kredit, Jurnal pencairan Kredit, dan Slip Pengambilan Tabungan. Besarnya plafon terdakwa menyesuaikan jumlah dana pelunasan kredit yang jatuh tempo yang terdakwa gunakan sebelumnya dan tergantung kebutuhan pribadi. Keseluruhan dokumen tersebut di atas terdakwa serahkan kepada saksi Rimbawan Setiowati (berkas terpisah) selaku bagian tabungan tanpa adanya tanda tangan dari Direksi BPR Jatibarang Sediaguna untuk diproses dan saksi Rimbawan Setiowati menuruti memproses kredit fiktif tersebut.

Perbuatan terdakwa, saksi Sukeriyati dan saksi Rimbawan Setiowati menciptakan kredit fiktif di BPR Jatibarang Sediaguna secara terus menerus berakhir ketika Tim dari OJK Tegal pada tanggal 12 Agustus 2019 melakukan pemeriksaan di BPR Jatibarang Setiaguna, dari

hasil pemeriksaan OJK ditemui 9.516 rekening kredit fiktif dengan total plafon Rp. 68.640.500.000,- (enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut digunakan oleh terdakwa, saksi Sukeriyati dan saksi Rimbawan Setiowati untuk keperluan pribadi dan membayar angsuran/pelunasan kredit fiktif sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari fasilitas kredit-kredit fiktif tersebut masuk ke dalam kolektibilitas kurang lancar/macet yang akan dilakukan penagihan karena jatuh tempo.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bahwa terdakwa Yuli Respitowanti als Yuli Binti Suwandi selaku Audit Intern BPR Jatibarang Sediaguna bersama Sukeriyati binti Sunono als Keri dan Rimbawan Setiowati als Ana binti Sukisman (masing-masing berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT BPR Jatibarang Sediaguna yang beralamat di Jln. Raya Timur Karanglo No. 9 Karanglo Jatibarang Brebes Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam

laporan, maupun dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Yuli Respintowati Binti Suwandi Alias Yuli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Tindak Pidana Perbankan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuli Respintowati Binti Suwandi Alias Yuli dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun bertempat di Lapas Klas IIA Wanita Di Semarang, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 9 (sembilan) bulan.

- c. Menyatakan Kesemua barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Nomor: 95/Pid.Sus/2020/PN Brebes atas nama terdakwa Rimbawan Setiowati Alias Ana Binti Sukisman.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

##### 5. Amar Putusan

Keputusan hakim dalam kasus perkara tersebut memperhatikan, Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berikut amar putusan pada kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Bbs.

- a. Menyatakan Terdakwa Yuli Respintowati Binti Suwandi Alias Yuli, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan, membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha,



laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - e. Menetapkan barang bukti kesemuanya yang dipergunakan dalam perkara Nomor: 95/Pid.Sus/2020 PN Brebes atas nama terdakwa Rimbawan Setiowati Alias Ana Binti Sukisman;
  - f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Analisis Penulis

Perkara Nomor: 95/Pid.Sus/2020 PN Bbs, seperti yang sudah di bahas sebelumnya yaitu termasuk dalam dalam tindak pidana perbankan berkaitan dengan usaha bank yang termasuk dalam kategori kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 49 ayat (1) huruf a, istilah pengawai bank dalam pasal ini adalah semua pejabat dan karyawan bank. Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Akibat perbuatan terdakwa, bahwa dokumen kredit fiktif (Kartu Pembayaran Angsuran/kartu putih) yang Terdakwa buat sebanyak 2.565 rekening fiktif dimana kartu pembayaran angsuran atau kartu putih tersebut diatasnya tertulis huruf “Y” yang berarti kartu sebanyak itu dana pencariannya digunakan oleh Terdakwa dengan plafon sejumlah Rp19.620.000.000,- (Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Baki Debet 13.732.353.500,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dimana total plafon kredit tersebut diproses dan dicairkan dengan menggunakan data debitur yang tidak benar (fiktif), tanpa terdapat berkas kredit dan dokumen pendukung serta dana pencairan kredit digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk membayar angsuran atau

melunasi kredit fiktif sebelumnya, yang menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan PT. BPR Jatibarang Sediaguna, membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan suatu bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan kejahatan berupa pencatatan palsu dalam pembukuan suatu Bank yaitu pidana penjara 5 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Pada Perkara No. 94/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan kejahatan terhadap pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yaitu pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan. Menurut Penulis, terdakwa Yuli Respintowati Binti Suwandi Alias Yuli sudah dijatuhi hukuman pidana di atas pidana minimal mengingat akibat hukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penetapan hakim

sudah pantas mengingat tindak pidana perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi yang dapat memberi dampak pada ekonomi masyarakat berupa terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Rendahnya integritas pelaku dalam menjalankan pekerjaannya seharusnya bisa menjadi bagian pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman terdakwa mengingat pada dasarnya terdakwa melakukan kejahatan dalam kapasitasnya sebagai Audit Intern bank.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan sanksi pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.
2. Akibat hukum terhadap para pihak bank yang melakukan tindak pidana perbankan pada Perkara No. 94/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs berkaitan dengan usaha bank yang termasuk dalam kategori kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan. Hukuman pidana tersebut sudah merupakan hukuman di atas pidana minimal mengingat akibat hukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan rendahnya integritas pelaku dalam menjalankan pekerjaannya seharusnya bisa menjadi bagian pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman terdakwa mengingat pada dasarnya terdakwa melakukan kejahatan dalam kapasitasnya sebagai Audit Intern bank.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari segala keinginan untuk melakukan tindak pidana perbankan dalam intern suatu bank yang hanya akan merugikan dirinya sendiri, nasabah, bahkan negara, maka diperlukan peningkatan kemampuan dan pembinaan serta kesejahteraan pegawai bank,
2. Peranan dan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap jajaran Perbankan nasional diperlukan agar dapat meminimalisir tindak pidana perbankan yang dapat berakibat buruk bagi nasabah suatu bank jika tindak pidana perbankan tersebut menimbulkan bangkrutnya bank dengan sejumlah uang nasabahnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bank yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Andrisman, Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009
- Ariman, Rasyid & Raghieb, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Steel, Pidana, Tindak pidana, Teori-teori, Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Gazali, Djoni S. & Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Yogyakarta: Prenada Media, 2010.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Leden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar. Grafika, 2009.
- Pawennei, Mulyati & Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Setiadi, Edi & Yulia, Rena, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Susilo, Sri Y; Triandaru, Sigit; & Santoso, Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

### **Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan



**Jurnal/Makalah/Artikel:**

Budiyono, Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 Edisi Khusus, Februari 2011:113-122.

Hana Faridah, Jenis-Jenis Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 1, Desember 2018:106-125.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>. Online: tanggal 05 Januari 2020, pukul 10.29 Wib.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-10-1998-perubahan-uu-7-1992-perbankan>. diterbitkan 04 November 2019, diakses tanggal 06 Januari 2021.

Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidahaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentas)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.

Ramiyanto, Penjatuhannya Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 3, 2016: DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i3.14>.

Romdhoni, Helmi, *Bentuk tindak Pidana Perbankan, Kebanyakan Pelakunya Orang Dalam*, Online <https://www.inanews.co.id/2020/05/bentuk-tindak-pidana-perbankan-kebanyakan-pelakunya-orang-dalam/> dipublikasikan 2 Mei 2020, diakses tanggal 06 Januari 2021.

Tampubolon, Nelson, *Pahami & Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Otoritas Jasa Keuangan, Online: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/>. Diakses 6 Januari 2021.

Wanda, Alifin Nurahmana, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank, *Indonesian Journal of Criminal Law (IjoCL)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020:1-44.

Windia, Iketut, Tindak Pidana dalam Perbankan (Suatu Kajian Teoritis), *Widyasrama*, Vol. 23, No. 1, Agustus 2014:147-159